

Unaudited

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017**

**BPTP Sumatera Utara
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017**



Alamat Kantor:

**Jalan Jend. Besar A.H. Nasution No. 1B Medan 20143
Telp. 061-7870710; Fax. 061-7861020; E-mail: bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP Sumatera Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Medan, 31 Desember 2017

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Khadijah EL Ramija
Dr. Khadijah EL Ramija, SPi.,MP.
NIP. 196902281996032002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja Pegawai

B.3 Belanja Barang

B.4 Belanja Modal

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.4.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Tanah

C.2.2 Peralatan dan Mesin

C.2.3 Gedung dan Bangunan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3 Aset Lainnya

C.3.1 Aset Tak Berwujud

C.3.2 Aset Lain-lain

C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

- C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga
- C.5 Ekuitas
 - C.5.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.10 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan
 - E.4.3 Penyesuaian Nilai Aset
 - E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Medan, 31 Desember 2017

Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Khadijah EL Ramija, SPi.,MP.

NIP. 196902281996032002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp578.562.191,00 atau mencapai 140,02% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp413.200.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp32.176.607.327,00 atau mencapai 97,88% dari alokasi anggaran sebesar Rp32.874.448.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.161.692.916.803,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp897.411.650,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.160.704.939.305,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp90.565.848,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.161.692.916.803,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp555.516.957,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp21.852.384.973,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-21.296.868.016,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp2.012.987.184,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-19.283.880.832,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp1.148.451.902.266,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-19.283.880.832,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp886.167.115,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp31.606.996.386,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp1.161.661.184.935,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTP SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	413.200.000,00	578.562.191,00	140,02	498.816.502,00
Jumlah Pendapatan		413.200.000,00	578.562.191,00	140,02	498.816.502,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	8.364.373.000,00	8.058.187.618,00	96,34	8.217.352.567,00
Belanja Barang	B.3	8.881.375.000,00	8.499.766.756,00	95,70	9.479.902.250,00
Belanja Modal	B.4	15.628.700.000,00	15.618.652.953,00	99,94	5.121.527.219,00
Jumlah Belanja		32.874.448.000,00	32.176.607.327,00	97,88	22.818.782.036,00

II. NERACA

BPTP SUMATERA UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.1	33.470.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.2	-167.350,00	0,00
Persediaan	C.1.3	864.109.000,00	210.086.000,00
Jumlah Aset Lancar		93.556.650,00	210.086.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	1.102.003.933.000,00	1.121.831.748.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	11.406.040.504,00	10.442.301.026,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	52.046.271.560,00	25.975.143.023,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	5.803.770.800,00	1.028.617.188,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	29.975.000,00	29.975.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-7.587.089.613,00	-6.348.300.080,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-1.470.844.041,00	-4.140.602.054,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-1.527.117.905,00	-640.555.284,00
Jumlah Aset Tetap		1.160.704.939.305,00	1.148.178.326.819,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	265.770.528,00	265.770.528,00
Aset Lain-lain	C.3.2	581.671.693,00	530.672.693,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.3	-498.647.470,00	-450.348.348,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-258.228.903,00	-257.579.153,00
Jumlah Aset Lainnya		90.565.848,00	88.515.720,00
Jumlah Aset		1.160.889.061.803,00	1.148.476.928.539,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	31.731.868,00	25.026.273,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		31.731.868,00	25.026.273,00
Jumlah Kewajiban		31.731.868,00	25.026.273,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	1.161.661.184.935,00	1.148.451.902.266,00
Jumlah Ekuitas		1.161.661.184.935,00	1.148.451.902.266,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		1.161.692.916.803,00	1.148.476.928.539,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPTP SUMATERA UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	555.516.957,00	492.136.502,00
JUMLAH PENDAPATAN		555.516.957,00	492.136.502,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	8.058.187.618,00	8.217.352.567,00
Beban Persediaan	D.3	3.213.758.900,00	2.389.944.930,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.724.072.031,00	3.084.460.387,00
Beban Pemeliharaan	D.5	323.621.217,00	379.773.500,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.547.469.153,00	3.487.367.882,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	3.985.108.704,00	1.625.790.978,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	167.350,00	-11.050,00
JUMLAH BEBAN		21.852.384.973,00	19.184.679.194,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-21.296.868.016,00	-18.692.542.692,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	15.500.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	2.756.886.384,00	997.659.000,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	759.399.200,00	1.160.932.551,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.012.987.184,00	-163.273.551,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-19.283.880.832,00	-18.855.816.243,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTP SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	1.148.451.902.266,00	1.143.469.921.539,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-19.283.880.832,00	-18.855.816.243,0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	886.167.115,00	1.469.092.436,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	0,00	1.273.456.436,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0,00	195.636.000,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	886.167.115,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	31.606.996.386,00	22.368.704.534,00
EKUITAS AKHIR		1.161.661.184.935,00	1.148.451.902.266,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Sumatera Utara

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/ 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Rencana Strategis BPTP Sumatera Utara merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan

nasional. BPTP Sumatera Utara telah menetapkan beberapa program untuk periode ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fokus kegiatan dan capaian hasil pengkajian dan pengembangan berorientasi pasar/preferensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah.
2. Meningkatkan kuantitas/kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian.
3. Meningkatkan kapabilitas manajemen pengkajian dan diseminasi untuk memperluas jejaring kerjasama.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian.
5. Meningkatkan efektivitas manajemen institusi.

Dalam tataran praktisnya, berbagai rencana strategis kegiatan BPTP Sumatera Utara pada periode ini yang akan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan strategis yang diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pertanian hingga saat ini.

Sesuai dengan Permentan No. 16/2006 yang telah disempurnakan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 350/Kpts/OT.210/6/2001 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 798/1994, BPTP Sumatera Utara bertugas melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengujian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPTP Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
2. Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
3. Pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan,
4. Menyiapkan kerja sama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
5. Pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Visi

Mengacu kepada visi Badan Litbang Pertanian 2010-2014, untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia dalam menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian mendukung terwujudnya sistem pertanian industrial, serta visi BBP2TP di mana pada tahun 2014 menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian tepat guna bertaraf internasional, sebagai lembaga yang relatif baru (Peraturan Menteri Nomor 633/Kpts/OT.140/12/2003, tgl 30 Desember 2003) maka visi BPTP Sumatera Utara adalah: "Menjadi lembaga Litbang pertanian unggul dalam menghasilkan inovasi teknologi mendukung pertanian tangguh, sesuai dinamika kebutuhan pengguna di Provinsi Sumatera Utara"

Misi

Untuk mencapai visi diatas, BPTP Sumatera Utara akan melaksanakan misi antara lain, yaitu:

1. Menciptakan, merencanakan, dan mengembangkan inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pertanian sesuai dinamika kebutuhan pengguna.
2. Meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi kepada para pengguna serta meningkatkan penjangkauan umpan balik inovasi pertanian.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan IPTEK untuk pengembangan agribisnis dan pembangunan pertanian.
4. Mengembangkan kapasitas institusi BPTP menuju pengelolaan institusi yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

Adapun tujuan BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Membangun aliansi strategis untuk mengembangkan jejaring kegiatan pengkajian dan diseminasi pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPTP Sumatera Utara dalam menjalankan tupoksinya.
3. Mengembangkan sinkronisasi dan koordinasi dengan institusi pusat dan daerah untuk menunjang pembangunan pertanian wilayah.

Sasaran utama BPTP Sumatera Utara tahun 2010-2014 adalah dihasilkannya inovasi pertanian unggulan spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru di Provinsi Sumatera Utara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP Sumatera Utara menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Sumatera Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Sumatera Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP Sumatera Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	299.700.000,00	299.700.000,00
Pendapatan Jasa	113.500.000,00	113.500.000,00
Jumlah Pendapatan	413.200.000,00	413.200.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	8.364.373.000,00	8.364.373.000,00
Belanja Barang	7.512.500.000,00	8.881.375.000,00
Belanja Modal	9.512.700.000,00	15.628.700.000,00
Jumlah Belanja	25.389.573.000,00	32.874.448.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp578.562.191,00 atau mencapai 140,02% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp413.200.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	299.700.000,00	496.211.182,00	165,57
Pendapatan Jasa	113.500.000,00	53.095.000,00	46,78
Pendapatan luran dan Denda	0,00	21.710.775,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	7.545.234,00	0,00
Jumlah	413.200.000,00	578.562.191,00	140,02

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 15,99% dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	496.211.182,00	354.876.502,00	39,83
Pendapatan Jasa	53.095.000,00	139.470.000,00	-61,93
Pendapatan luran dan Denda	21.710.775,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	7.545.234,00	4.470.000,00	68,80
Jumlah	578.562.191,00	498.816.502,00	15,99

Dibandingkan dengan tahun 2016, realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 39,83%, hal ini disebabkan antara lain:

1. Naiknya hasil penjualan benih sumber (kegiatan UPBS) padi yang dikelola di KP Pasar Miring.
2. Penjualan hasil bongkaran dari kegiatan renovasi gedung kantor BPTP Sumut, dilakukan pada tahun 2017.

Sementara itu dibandingkan dengan tahun 2016, realisasi Pendapatan Jasa tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 61,93%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 gedung Laboratorium Tanah BPTP Sumatera Utara direnovasi, sehingga kegiatan di laboratorium untuk sementara dihentikan. Ini mengakibatkan turunnya penerimaan jasa dari hasil analisis laboratorium.

Pada tahun 2017 terdapat Pendapatan luran dan Denda yang merupakan denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Screen House di KP Gurgur sebesar Rp.21.710.775.

Dibandingkan dengan tahun 2016, realisasi Pendapatan Lain-lain tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 68,80%, hal ini disebabkan antara lain penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dan penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu (penerimaan kelebihan bayar atas jasa konsultan perencanaan untuk renovasi gedung kantor BPTP Sumatera Utara).

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp32.176.607.327,00 atau 97,88% dari anggaran belanja sebesar Rp32.874.448.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		8.364.373.000,00	8.059.297.808,00	96,35
Belanja Barang		8.881.375.000,00	8.499.766.756,00	95,70
Belanja Modal		15.628.700.000,00	15.618.652.953,00	99,94
Total Belanja Kotor		32.874.448.000,00	32.177.717.517,00	97,88
Pengembalian Belanja			-1.110.190,00	0,00
Total Belanja		32.874.448.000,00	32.176.607.327,00	97,88

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 41,01% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada tahun 2017, BPTP Sumatera Utara menerima dana SMARTD untuk kegiatan renovasi gedung BPTP Sumatera Utara (lanjutan 2016 adalah renovasi gedung Administrasi dan Laboratorium, untuk tahun 2017 adalah renovasi gedung Sosek, Perpustakaan dan Aula) sebesar Rp.10.680.314.000.
2. Pembangunan Screen House di KP Gurgur senilai Rp.1.000.000.000.
3. Renovasi gedung administrasi di KP. Pasar Miring senilai Rp.1.536.386.000.
4. Penambahan anggaran untuk Kegiatan APBN-P 2017 yang terdiri dari kegiatan Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp.3.868.375.000.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Belanja Pegawai	8.058.187.618,00	8.217.352.567,00	-1,94
Belanja Barang	8.499.766.756,00	9.479.902.250,00	-10,34
Belanja Modal	15.618.652.953,00	5.121.527.219,00	204,96
Total Belanja	32.176.607.327,00	22.818.782.036,00	41,01

B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.058.187.618,00 dan Rp8.217.352.567,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -1,94% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dikarenakan adanya 5 orang pegawai BPTP Sumatera Utara yang memasuki masa pensiun, yaitu: M. Amin, Syamsurizal Lubis, Khairuddin Batubara, Ir. Loso Winarto, Ir. Amrizal Yusuf dan 1 orang pegawai yang pindah tugas ke Pusat Penelitian Tanaman Pangan di Bogor yaitu: Dr. Andriko Noto Susanto,SP,MP.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.925.627.808,00	8.120.432.818,00	-2,40
Belanja Lembur	133.670.000,00	103.220.000,00	29,50
Jumlah Belanja Kotor	8.059.297.808,00	8.223.652.818,00	-2,00
Pengembalian Belanja Pegawai	-1.110.190,00	-6.300.251,00	-82,38
Jumlah Belanja	8.058.187.618,00	8.217.352.567,00	-1,94

B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.499.766.756,00 dan Rp9.479.902.250,00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar -10,34% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan Belanja Barang Persediaan sebesar Rp.540.990.531 atau -22,11% dibanding belanja tahun 2016.
2. Penurunan Belanja Jasa sebesar Rp.99.198.614 atau -18,84% dibanding belanja tahun 2016. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2017 pembayaran belanja langganan listrik, air berkurang karena gedung kantor BPTP Sumatera Utara sedang direnovasi.
3. Penurunan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.56.152.283 atau -14,60% dibanding belanja tahun 2016. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2017 pemeliharaan gedung bangunan berkurang karena gedung kantor BPTP Sumatera Utara sedang direnovasi.
4. Penurunan Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp.939.898.729 atau -26,95% dibanding belanja tahun 2016. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2017 dilakukan penghematan anggaran kegiatan pengkajian dan diseminasi.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	778.966.000,00	669.203.000,00	16,40
Belanja Barang Non Operasional	2.510.923.354,00	1.888.581.691,00	32,95
Belanja Barang Persediaan	1.906.409.950,00	2.447.400.481,00	-22,11
Belanja Jasa	427.477.082,00	526.675.696,00	-18,84
Belanja Pemeliharaan	328.521.217,00	384.673.500,00	-14,60
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.547.469.153,00	3.487.367.882,00	-26,95
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	76.000.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	8.499.766.756,00	9.479.902.250,00	-10,34
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	8.499.766.756,00	9.479.902.250,00	-10,34

B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.618.652.953,00 dan Rp5.121.527.219,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 204,96% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.10.982.218.106 atau 331,60%. Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2017 BPTP Sumatera Utara menerima anggaran SMARTD untuk renovasi gedung dan pembangunan screen house.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.004.508.478,00	1.809.600.850,00	-44,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.294.144.475,00	3.311.926.369,00	331,60
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	320.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	15.618.652.953,00	5.121.527.219,00	204,96
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	15.618.652.953,00	5.121.527.219,00	204,96

B.4.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.004.508.478,00 dan Rp1.809.600.850,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami penurunan sebesar -44,49% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh belanja modal peralatan dan mesin diperoleh dari APBN-P untuk kegiatan Hortikultura dan Perkebunan.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.004.508.478,00	1.809.600.850,00	-44,49
Jumlah Belanja Kotor	1.004.508.478,00	1.809.600.850,00	-44,49
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.004.508.478,00	1.809.600.850,00	-44,49

B.4.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp14.294.144.475,00 dan Rp3.311.926.369,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 331,60% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain pada tahun 2017 BPTP Sumatera Utara menerima anggaran SMARTD untuk renovasi gedung dan pembangunan screen house.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.294.144.475,00	3.311.926.369,00	331,60
Jumlah Belanja Kotor	14.294.144.475,00	3.311.926.369,00	331,60
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	14.294.144.475,00	3.311.926.369,00	331,60

B.4.3 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp320.000.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran penambahan untuk belanja modal tersebut.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	320.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	320.000.000,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	320.000.000,00	0,00	0,00

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp33.470.000,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No	Nama	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1.	Kelebihan pembayaran Tunjangan Jabfungan. Novia Chairuman	1.750.000	0.00
2.	Kelebihan pertanggungjawaban keuangan pembelian Saprodi kegiatan Produksi Benih Kedelai UPBS	4.620.000	0.00
3.	Kelebihan pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas kegiatan UPBS Kedelai	1.900.000	0.00
4.	Kelebihan pertanggungjawaban keuangan pembelian pupuk kandang kegiatan benih padi UPBS	11.400.000	0.00
5.	Perjalanan dinas kegiatan Produksi benih padi (UPBS)	5.500.000	0.00
6.	Perjalanan dinas kegiatan Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Peternakan Kambing	3.500.000	0.00
7.	Perjalanan dinas untuk kegiatan Pendampingan Penerapan Teknologi Baru Mendukung Kawasan Peternakan Kerbau di Sumut	4.800.000	0.00
Jumlah		33.470.000	0,00

C.1.2 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-167.350,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	33.470.000	0.5%	167.350
Kurang Lancar	0.00	10%	0.00
Diragukan	0.00	50%	0.00
Macet	0.00	100%	0.00

C.1.2 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp897.411.650,00 dan Rp210.086.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Suku Cadang	14.450.000,00	14.450.000,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	195.636.000,00
Bahan Baku	849.659.000,00	0,00
Jumlah	897.411.650,00	210.086.000,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.102.003.933.000,00 dan Rp1.121.831.748.000,00. Selisih sebesar Rp.19.827.815.000 merupakan hasil dari kegiatan Revaluasi Aset BMN yang dilakukan oleh KPKNL Medan pada tahun 2017.

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.406.040.504,00 dan Rp10.442.301.026,00. Terdapat penambahan sebesar Rp.963.739.478 dibanding tahun sebelumnya disebabkan antara lain: penambahan melalui pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp.1.004.508.478 dan pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp-50.999.000.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp52.046.271.560,00 dan Rp25.975.143.023,00.

Terdapat kenaikan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp.26.071.128.537 dibanding dengan tahun sebelumnya disebabkan antara lain: penambahan nilai melalui pembelian dan renovasi gedung dan bangunan sebesar Rp.14.294.144.475, penambahan melalui kegiatan Revaluasi Aset sebesar Rp.15.955.928.457. Pengurangan dari kegiatan Revaluasi Aset BMN sebesar Rp.4.178.944.395.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.803.770.800,00 dan Rp1.028.617.188,00.

Terdapat kenaikan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.4.755.153.612 dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan antara lain: penambahan nilai melalui pembelian irigasi sebesar Rp.197.500.000, pembelian jaringan sebesar Rp.122.500.000, penambahan melalui kegiatan Revaluasi Aset sebesar Rp.4.758.053.658. Pengurangan dari kegiatan revaluasi aset BMN sebesar Rp.302.900.046.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp29.975.000,00 dan Rp29.975.000,00.

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-10.585.051.559,00 dan Rp-11.129.457.418,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	11.406.040.504,00	-7.587.089.613,00	3.818.950.891,00
2.	Gedung dan Bangunan	52.046.271.560,00	-1.470.844.041,00	50.575.427.519,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.803.770.800,00	-1.527.117.905,00	4.276.652.895,00
4.	Aset Tetap Lainnya	29.975.000,00	0,00	29.975.000,00
Akumulasi Penyusutan		69.286.057.864,00	-10.585.051.559,00	58.701.006.305,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp265.770.528,00 dan Rp265.770.528,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	5.650.000,00
Software	260.120.528,00
Jumlah	265.770.528,00

C.3.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp581.671.693,00 dan Rp530.672.693,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP Sumatera Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-756.876.373,00 dan Rp-707.927.501,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	265.770.528,00	-258.228.903,00	7.541.625,00
2.	Aset Lain-lain	581.671.693,00	-498.647.470,00	83.024.223,00
Akumulasi Penyusutan		847.442.221,00	-756.876.373,00	90.565.848,00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp31.731.868,00 dan Rp25.026.273,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPTP Sumatera Utara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	31.731.868,00	25.026.273,00
Jumlah	31.731.868,00	25.026.273,00

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.160.841.769.746,00 dan Rp1.148.451.902.266,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp555.516.957,00 dan Rp492.136.502,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	21.710.775,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	53.095.000,00	137.260.000,00	-61,32
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	474.137.000,00	346.477.010,00	36,85
Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	0,00	1.000.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.574.182,00	7.399.492,00	-11,15
Jumlah	555.516.957,00	492.136.502,00	12,88

1. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah merupakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Screen House di KP Gurgur dan telah dibayarkan dengan bukti Disetor atas denda keterlambatan an. CV. Pegeheysa NTPN: A134B0H94MLF7S JL NTB: 171206060819 tgl.06-12-2017 senilai Rp21.710.775.
2. Penurunan pendapatan jasa tenaga, pekerjaan (laboratorium) sebesar Rp.84.165.000 atau -61,32% disebabkan karena bangunan laboratorium BPTP Sumatera Utara dilakukan renovasi pada tahun 2017 s.d. 2018, sehingga operasionalnya berhenti untuk sementara.
3. Terdapat penambahan pendapatan hasil penjualan pertanian berupa penjualan benih sumber padi melalui kegiatan UPBS sebesar Rp.127.659.990 atau 36,85% dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan bertambahnya produksi benih sumber padi yang dilakukan di KP Pasar Miring.
4. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp.825.310 atau -11,15% dibanding dengan tahun sebelumnya, disebabkan pada tahun 2017

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.058.187.618,00 dan Rp8.217.352.567,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	5.396.212.300,00	5.498.679.600,00	-1,86
Beban Pembulatan Gaji PNS	72.471,00	75.522,00	-4,04
Beban Tunj. Anak PNS	108.977.916,00	115.057.971,00	-5,28
Beban Tunj. Beras PNS	273.573.240,00	285.914.160,00	-4,32
Beban Tunj. Fungsional PNS	884.330.000,00	924.645.000,00	-4,36
Beban Tunj. PPh PNS	55.442.751,00	134.540.132,00	-58,79
Beban Tunj. Struktural PNS	8.820.000,00	7.020.000,00	25,64
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	364.925.940,00	374.573.392,00	-2,58
Beban Tunjangan Umum PNS	161.410.000,00	175.504.790,00	-8,03
Beban Uang Lembur	133.670.000,00	103.220.000,00	29,50
Beban Uang Makan PNS	670.753.000,00	598.122.000,00	12,14
Jumlah	8.058.187.618,00	8.217.352.567,00	-1,94

Penurunan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dikarenakan adanya 5 orang pegawai BPTP Sumatera Utara yang memasuki masa pensiun, yaitu: M. Amin, Syamsurizal Lubis, Khairuddin Batubara, Ir. Loso Winarto, Ir. Amrizal Yusuf dan 1 orang pegawai yang pindah tugas ke Pusat Penelitian Tanaman Pangan di Bogor yaitu: Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.213.758.900,00 dan Rp2.389.944.930,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	375.528.000,00	233.418.000,00	60,88
Beban Persediaan konsumsi	2.838.230.900,00	2.156.526.930,00	31,61
Jumlah	3.213.758.900,00	2.389.944.930,00	34,47

1. Kenaikan pada beban persediaan bahan baku sebesar Rp.142.110.000 atau 60,88% dibanding tahun sebelumnya disebabkan adanya penambahan kegiatan pada APBN-P pada tahun 2017.
2. Kenaikan pada beban konsumsi sebesar Rp.681.703.970 atau 31,61% dibanding tahun sebelumnya disebabkan adanya penambahan kegiatan pada APBN-P pada tahun 2017.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.739.632.220,00 dan Rp3.084.460.387,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Bahan	734.914.914,00	417.792.066,00	75,91
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.549.832.440,00	1.237.796.625,00	25,21
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	142.516.000,00	136.150.000,00	4,68
Beban Honor Output Kegiatan	226.176.000,00	232.993.000,00	-2,93
Beban Jasa Konsultan	36.000.000,00	18.000.000,00	100,00
Beban Jasa Profesi	121.050.000,00	169.650.000,00	-28,65
Beban Keperluan Perkantoran	605.250.000,00	507.853.000,00	19,18
Beban Langganan Air	19.473.970,00	36.278.033,00	-50,43
Beban Langganan Listrik	226.796.999,00	249.024.813,00	-16,75
Beban Langganan Telepon	17.421.897,00	17.222.850,00	-6,32
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	31.200.000,00	25.200.000,00	23,81
Beban Sewa	29.000.000,00	36.500.000,00	-20,55
Jumlah	3.739.632.220,00	3.084.460.387,00	19,71

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp323.621.217,00 dan Rp379.773.500,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97.800.000,00	147.797.500,00	-33,83
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	225.821.217,00	231.976.000,00	-2,65
Jumlah	323.621.217,00	379.773.500,00	-14,79

Beban pemeliharaan turun sebesar Rp.56.152.283 atau -14,79% dari tahun sebelumnya disebabkan pada tahun 2017 dilakukan renovasi gedung dan bangunan kantor BPTP Sumatera Utara sehingga biaya pemeliharaan berkurang dari tahun sebelumnya.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.547.469.153,00 dan Rp3.487.367.882,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1.924.144.181,00	2.639.452.403,00	-27,10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.667.000,00	10.883.000,00	-57,12
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	618.657.972,00	837.032.479,00	-26,09
Jumlah	2.547.469.153,00	3.487.367.882,00	-26,95

Beban perjalanan dinas mengalami penurunan sebesar Rp.939.898.729 atau -26,95% dibanding tahun sebelumnya disebabkan biaya perjalanan diatur maksimal 10% dari total kegiatan yang ada.

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.985.108.704,00 dan Rp1.625.790.978,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Paten	649.750,00	324.875,00	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.509.186.382,00	579.657.769,00	160,36
Beban Penyusutan Irigasi	403.456.318,00	14.892.079,00	2.609,20
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	783.683.667,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	2.322.682,00	791.432,00	193,48
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	21.526.829,00	19.525.464,00	10,25
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.264.283.076,00	1.010.599.359,00	25,10
Jumlah	3.985.108.704,00	1.625.790.978,00	145,12

Peningkatan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp.2.359.317.726 atau 145,12% dibanding tahun sebelumnya karena bertambahnya umur ekonomis dari setiap aset yang digunakan.

D.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp167.350,00 dan Rp-11.050,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	167.350,00	-11.050,00	-100,00
Jumlah	167.350,00	-11.050,00	-100,00

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-759.399.200,00	-1.160.932.551,00	-34,59
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0,00	570.000,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.483.056.150,00	789.159.000,00	87,93
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	428.960.000,00	204.030.000,00	110,24
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.500.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	6.250.000,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.295.234,00	3.900.000,00	-66,79
Jumlah	1.175.662.184,00	-163.273.551,00	-820,06

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.144.879.875.897,00 dan Rp1.144.879.875.897,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-20.089.306.614,00 dan Rp-18.855.816.243,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp886.167.115,00 dan Rp1.469.092.436,00.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.273.456.436,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.2 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp195.636.000,00.

E.4.3 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.4 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp886.167.115,00 dan Rp0,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2017.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	-19.827.815.000,00
Gedung dan Bangunan	11.776.984.062,00
Jalan dan Jembatan	2.275.877.500,00
Irigasi	2.179.276.112,00
Jumlah	886.167.115,00

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp31.606.996.386,00 dan Rp22.368.704.534,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	32.176.607.327,00
Diterima dari Entitas Lain	-578.562.191,00
Transfer Masuk	8.951.250,00
Jumlah	31.606.996.386,00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2017 saldo DDEL adalah sebesar Rp-578.562.191,00 sedangkan DKEL sebesar Rp32.176.607.327,00.

E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp8.951.250,00 yang terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp8.951.250,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2017.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin		10.230.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-1.278.750,00
Jumlah			8.951.250,00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.160.841.769.746,00 dan Rp1.148.451.902.266,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Pejabat keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan masih sama dengan tahun 2017.
2. Beban langganan daya dan jasa berupa Listrik sejumlah Rp.19.485.506, Air sejumlah Rp.1.492.080 dan Telepon sebesar Rp.1.288.198 pemakaian di bulan Desember 2017 dan dibayarkan pada bulan Januari 2018.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada tahun 2017 telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 4 kali, yang pertama pada tanggal 16 Mei 2017, total Dipa awal Rp.25.389.573.000 direvisi menjadi Rp.29.156.073.000. Revisi yang kedua pada tanggal 20 Juli 2017 dengan total Dipa tidak berubah. Revisi yang ketiga pada tanggal 16 Agustus 2017, total Dipa menjadi Rp.32.874.448.000, bertambah sebesar Rp.3.715.375.000 dari total Dipa sebelumnya. Dan revisi yang ke-4 dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan total Dipa tetap, revisi Dipa dilakukan karena adanya penambahan output kegiatan.
2. Pada tahun 2017 BPTP Sumatera Utara telah dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Balai yang sebelumnya dijabat oleh Dr. Andriko Noto Susanto diganti oleh Dr. Khadijah EL Ramija. Dr. Andriko Noto Susanto menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan di Bogor. Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 280/Kpts/KU.010/4/2017 tanggal 26 April 2017.
3. Pencatatan dan penatausahaan BMN Satker BPTP Sumut per 31 Desember 2017 senilai Rp.1.175.432.274.994 (Satu trilyun seratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), sebagian BMN tersebut saat ini dimanfaatkan dan dipergunakan oleh PT. RPN (Pusat Penelitian Kelapa Sawit dan Balai Penelitian Karet Medan) senilai Rp.795.588.917.404 (tujuh ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus empat rupiah). Secara rinci jenis BMN tersebut adalah sebagai berikut:

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Aset	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	722,876,309,000	20,772,507 M2
2.	Gedung Bangunan	11,999,774,331	38 Unit
3.	Peralatan Mesin	47,875,550	3 Unit
4.	Jalan Irigasi dan Jembatan	-	-

Balai Penelitian Karet Medan dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Aset	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	44.540.599.000	9,888,100 M2
2.	Gedung Bangunan	15.251.584.851	121 Unit
3.	Peralatan Mesin	787.516.154	4,055 Unit
4.	Jalan Irigasi dan Jembatan	85.258.518	194 Unit

4. Atas permasalahan pemanfaatan dan penggunaan BMN BPTP Sumut oleh PT RPN tersebut telah dikordinasikan dengan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian guna mendapatkan penyelesaian permasalahan pemindahan BMN yang masih dipakai PT. RPN. Permasalahan tersebut telah ditangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa status kelembagaan PT. RPN akan diubah menjadi anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (yang merupakan holding BUMN Perkebunan), dan BMN Kementerian Pertanian yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan oleh PT. RPN akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP).